

Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Padende Kecamatan Marowola Kabupaten Sigi

Akbar Hidayat¹, Rita Yunus², Chaerul Anam³, Failur Rahman⁴, Andi Herman Jaya⁵

Prodi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Tadulako

E-mail : akbarhidayatakbar006@gmail.com

Article History:

Received: 01 Juni 2024

Revised: 14 Juni 2024

Accepted: 15 Juni 2024

Keywords: Pemerintah Desa, Kesejahteraan Masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Padende, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan untuk memahami secara mendalam upaya pemerintah Desa Padende dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Padende telah mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat melalui pertanian, UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik, serta program-program sosial seperti pendidikan dan kesehatan.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu permasalahan yang serius dalam proses pembangunan nasional di Negara Indonesia. Permasalahan ini seakan tidak dapat dituntaskan secara serius, sedangkan upaya pemerintah telah melakukan berbagai program yang melibatkan sejumlah pakar kemiskinan nasional dan internasional. Pada dasarnya belum ada keberlanjutan (sustainability) strategi penanganan kemiskinan baik dalam satu rezim kekuasaan maupun pada saat peralihan rezim. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), tahun 2005 ada 35,10 juta penduduk miskin. Setelah itu data pada tahun 2006 menjadi 39,05 juta. Artinya jumlah penduduk miskin bertambah 3,95 juta. Pada tahun 2007 tercatat 37,17 juta orang. Dibandingkan tahun 2006, penduduk miskin turun sebesar 2,13 juta (Solikaturun, 2018).

Kemiskinan merupakan masalah sosial dan ekonomi yang besar karena hal ini dilanggengkan oleh lingkungan keluarga yang membentuk siklus yang berlangsung dari generasi ke generasi. Fenomena ini dikenal sebagai lingkaran setan kemiskinan (Sukirno dalam Yuliyantini, 2023).

Tata kelola desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mengacu pada penyelenggaraan kepentingan dan permasalahan politik masyarakat kecil, sebagaimana tercantum dalam Pasal Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. 1. Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat atau berfungsi sebagai Bagian penting dari pemerintahan yang menjadi sandaran masyarakat menjadi alasan utama dibentuknya pemerintahan desa di suatu daerah tertentu (Bahasoan et al., 2024; Zainudin, 2016)

Kemauan politik dari seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya pemerintah, diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan pengentasan kemiskinan. Mengurangi kemiskinan adalah sebuah proses yang memerlukan waktu dan upaya, serta memerlukan pendekatan yang metodis. Pemerintah daerah harus mempunyai kearifan (Herlina dalam Komariah, 2017).

Pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat saat ini merupakan sebagian besar tanggung jawab Pemerintah Desa dan hanya merupakan sebagian kecil dari tugas-tugas yang harus diselesaikan. Pertama, dalam hal pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa tentu ingin melihat bagaimana masyarakat di desa dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri (peningkatan kapasitas), menciptakan lapangan kerja, dan memimpin masyarakat menuju kesejahteraan yang mereka idamkan (Ley, 2002).

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, sistem yang salah harus segera diperbaiki. Namun, selain membenahi sistem, terobosan baru juga harus dilakukan dengan mendobrak hambatan-hambatan yang menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Ley, 2002).

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Menurut Wiguna, kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu memanfaatkan semua pilihan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan mendasarnya, yang meliputi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, standar hidup yang terhormat, kebebasan, dan kebebasan. harga diri, dan rasa hormat orang lain, serta prospek buruk bagi negara dan negara (Rachmad dalam Susilowati, 2017).

Menurut Supriatna (1997:90), kemiskinan adalah suatu keadaan tertentu yang tidak terjadi pada seseorang secara sukarela. Ketika suatu populasi menunjukkan siklus ketidakberdayaan dan memiliki tingkat pendidikan, produktivitas tenaga kerja, pendapatan, gizi, dan kesejahteraan yang rendah, maka ia dianggap miskin. Keterbatasan sumber daya manusia dapat berkontribusi terhadap kemiskinan melalui pendidikan formal dan non-formal, yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan informal (*Poverty and Human Development*, 2004).

Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Di dunia saat ini, kesejahteraan didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air bersih untuk diminum, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan. akan meningkatkan kualitas hidup mereka dan memberikan status. kedudukan sosial yang menghasilkan kedudukan sosial yang sama terhadap warga negara lainnya (Basri dalam Laju, 2020).

Tata kehidupan dan penghidupan yang bersifat sosial, materiil, dan spiritual yang dilingkupi rasa aman, kesusilaan, serta ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan setiap warga negara berupaya memenuhi kebutuhannya, yang dimaksud dengan kesejahteraan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1. -kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial, serta keselamatan dan keamanan jiwa. Kesejahteraan hidup, yaitu suatu keadaan yang menunjukkan keadaan masyarakat yang hidup aman dan bahagia serta mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk dalam kesejahteraan. (Luju, 2020).

Upaya Pemerintah dan pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan berbagai pihak dan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan

kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Berikut adalah beberapa tindakan pemerintah dan pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka pembangunan kesejahteraan masyarakat :

a) Pembangunan Infrastruktur Dasar

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) diprakarsai oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pengembangan infrastruktur permukiman di pedesaan melalui partisipasi masyarakat individu dan kelompok dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut. meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Intinya, infrastruktur adalah sumber daya pemerintah yang diciptakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. (Simbolon, 2021)

b) meningkatkan Akses Terhadap Layanan Kesehatan dan Pendidikan

a. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh Konstitusi. Peningkatan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat sejahtera. Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan erat kaitannya dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan berhubungan dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang ingin diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat atas kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau dan bermutu (Widodo, 2012).

b. Pendidikan Dasar Seperti halnya kesehatan, pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran setan kemiskinan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui peningkatan mutu pendidikan (Widodo, 2012).

c) Pemberdayaan Ekonomi

Program-program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pembinaan kelompok usaha mikro dapat membantu meningkatkan pendapatan dan keberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat mencakup pengembangan sektor pertanian, umkm dan bumdes (Rufaidah, 2017).

d) Perlindungan Sosial

Salah satu instrumen kebijakan dan program yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial adalah perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan melalui peningkatan keterampilan masyarakat. Secara luas, perlindungan sosial juga mempertimbangkan perubahan sosial dan ekonomi global. Untuk mencapai kesejahteraan, kebijakan perlindungan sosial ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat (Sari, 2023).

e) Partisipasi Masyarakat

Demi mewujudkan negara kesejahteraan, keterlibatan masyarakat sangatlah penting. Warga

negara yang aktif mempunyai kekuatan untuk mengubah undang-undang dan kebijakan untuk mencerminkan kebutuhan dan kepentingan mereka, khususnya bagi mereka yang bergantung pada bantuan pemerintah (Anasiru dalam Riyanto, 2023). Partisipasi masyarakat juga mempercepat dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya dan layanan kesejahteraan yang disediakan pemerintah. Hal ini akan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Sukmana dalam Riyanto, 2023).

Dengan melakukan berbagai upaya ini secara komprehensif dan terpadu, diharapkan dapat tercapai pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini merupakan tujuan utama dari pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

Menurut (Riyanto, 2023), salah satu penunjang pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah partisipasi masyarakat merupakan investasi penting dalam membangun negara kesejahteraan khususnya pada program-program sosial. Masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam program-program ini dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan dan memastikan bahwa program-program tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, Indonesia memiliki program jaminan sosial (JPS) yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Program ini meliputi pendapatan tunai, bantuan sembako, dan kartu sembako bagi mereka yang terdampak Covid-19 (Nasrah dkk, 2021). Partisipasi masyarakat dalam program tersebut tercermin dalam mekanisme pengecekan informasi warga sekitar mengenai penerima manfaat untuk memastikan adanya dukungan kehidupan nyata bagi mereka yang membutuhkan. Selain itu, masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan atau program yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan kunci penting untuk memastikan bahwa program jaminan sosial benar-benar bermanfaat dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat merupakan kunci penting bagi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di bidang pendidikan, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang Digunakan: Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai permasalahan kemanusiaan dan sosial, dibandingkan mendeskripsikan permukaan realitas seperti yang dilakukan penelitian kuantitatif dengan sisi positifnya. Karena ilmuwan menafsirkan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungannya dan bagaimana makna tersebut memengaruhi perilakunya. Penelitian dilakukan dalam lingkungan yang naturalistik, bukan sebagai akibat manipulasi hasil atau manipulasi variabel. Tujuan penelitian kualitatif dapat dilihat: (1) Deskripsi objek penelitian (deskripsi objek); Agar objek penelitian dapat diinterpretasikan maka harus dideskripsikan melalui fotografi, video, ilustrasi dan cerita. Deskripsi ini dapat dibuat untuk objek-objek yang berupa peristiwa, interaksi sosial, kegiatan sosial keagamaan, dan lain-lain. (2) Mengungkapkan makna dibalik fenomena (exploring the mean behind the fenomena); Makna yang mendasari fenomena/fakta dapat terungkap apabila peneliti menunjukkan dan mengungkapnya melalui wawancara mendalam (wawancara departemen) dan observasi partisipan. (3) menjelaskan fenomena yang terjadi (explaining the object); Fenomena-fenomena yang muncul di lapangan terkadang tidak sama dengan tujuan, inti permasalahan dengan kata lain terlihat berbeda dengan tujuan utama, sehingga diperlukan penjelasan yang rinci, rinci dan sistematis (Adlini et al., 2022).

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik

wawancara dan observasi. Narasumber yang diwawancarai yaitu para petani, pelaku umkm dan masyarakat untuk mengetahui apa upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Padende, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Desa Padende adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Desa Padende merupakan salah satu dari 11 desa yang terletak di wilayah Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Luas wilayah Desa Padende 293,03 H yang terdiri dari 2 Dusun dan 4 RT.

Desa Padende yang terletak dibawah kaki gunung mempunyai potensi Agro wisata seperti BUNTIEDE dimana wisata ini mempunyai keindahan yang terletak dikaki gunung sehingga memperlihatkan keindahan kota palu dari puncak gunung. Selain agro wisata desa padende juga mempunyai potensi di bidang pertanian yang ada dalam pemberdayaan desa dapat menjadi sumber bahan makanan dan tak kalah penting adalah menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Desa Padende itu sendiri terdapat BUMDes memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengembangkan usaha dan potensi ekonomi lokal mereka. Hal ini dapat mencakup berbagai jenis usaha seperti kerajinan tangan, pariwisata, dan layanan jasa lainnya. Desa Padende sebagai objek dari penelitian ini dengan penduduk berjumlah sekitar 1.420 jiwa dengan jumlah penduduk laki – laki 726 jiwa dan Perempuan 694 jiwa, Serta 441 Kepala Keluarga.:

Desa Padende memiliki tanggung jawab yang besar pula mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dari peraturan perundang – undangan yang harus dilakukan secara tepat berdaya guna untuk masyarakat. Program yang mengarah kepada usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus diutamakan daripada program-program lainnya yang tidak bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat.

Desa Padende mempunyai tugas konstitusional yang sama dengan desa-desa lainnya berupaya semaksimal mungkin untuk menuju kesejahteraan bagi setiap insan yang berdiam dalam wilayah hukum Desa Padende. Pembangunan di Desa Padende belum terasa begitu maksimal. Banyak hal yang menjadi persoalan di Desa tersebut mulai dari program-program kerja yang belum sepenuhnya mengarah kepada upaya untuk mensejahterakan masyarakat di Desa tersebut.

Pemerintah Desa Padende melakukan langkah-langkah dengan program-programnya untuk mensejahterakan masyarakat. Terbukti dengan program yang diberikan kepada masyarakat yaitu ;

1. Pembangunan Infrastruktur Dasar

Pemerintah Desa Padende telah mengupayakan infrastruktur yang baik yang dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk desa padende. Infrastruktur dasar yang telah ada pada desa padende yaitu ;

a) Jalan

Jalan memiliki banyak manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Padende. Akses jalan Desa Padende bisa dikatakan cukup baik dikarenakan penghubung antara dusun 1 dan 2 sudah dilalui kendaraan roda 4 dengan kondisi jalan aspal dan beton dengan kondisi seperti ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Mobilitas orang dan barang : Jalan yang baik di Desa Padende memungkinkan pergerakan orang dan barang menjadi lebih efisien. Ini memudahkan masyarakat untuk bepergian ke tempat kerja, sekolah, dan fasilitas kesehatan, serta mendistribusikan

produk ke pasar.

2. Akses darurat : Jalan yang baik di Desa Padende memudahkan akses kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan polisi, yang penting untuk respons cepat dalam situasi darurat.
3. Dukungan terhadap bisnis lokal : Jalan yang baik di Desa Padende mendukung pertumbuhan bisnis lokal dengan memudahkan pelanggan mengakses toko dan layanan, serta memudahkan pengiriman barang

b) Air bersih

Air bersih di desa padende sangat baik dikarenakan adanya saluran pipa air PAM yang mengalir ke rumah warga akan tetapi belum maksimal karena hanya terdapat disun 3 dan 4. Air pam ini juga sangat membantu masyarakat khususnya para petani dikarenakan adanya irigasi yang mengalir ke lahan perkebunan milik warga. Adapun manfaat lain yaitu :

1. Pencegahan penyakit : Akses terhadap air bersih mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare, kolera, dan tifus. Ini sangat penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang rentan terhadap penyakit ini.
2. Produktivitas kerja : Kesehatan yang lebih baik berkat akses air bersih meningkatkan produktivitas kerja, karena masyarakat lebih jarang sakit dan dapat bekerja lebih efektif.
3. Higiene pribadi dan sanitasi : Air bersih memungkinkan praktik higiene yang baik, seperti mencuci tangan, mandi, dan membersihkan makanan, yang semuanya penting untuk mencegah penyebaran penyakit.

c) Listrik

Listrik di Desa Padende sangat baik dikarenakan semua masyarakat telah mempunyai kilometer tersendiri. Adapun beberapa manfaatnya :

1. Penerangan Rumah : Listrik menyediakan penerangan yang andal, memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas lebih lama di malam hari dan meningkatkan kenyamanan hidup.
2. Peralatan Rumah Tangga : Listrik memungkinkan penggunaan peralatan rumah tangga seperti lemari es, oven, mesin cuci, dan lainnya, yang membantu mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi rumah tangga.
3. Belajar di Malam Hari : Dengan penerangan yang baik, siswa dapat belajar di malam hari, sehingga meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.
4. Penerangan Jalan : Listrik menyediakan penerangan jalan yang membantu mengurangi kejahatan dan meningkatkan keamanan masyarakat pada malam hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Olan ia mengatakan “infrastruktur di Desa Padende dapat dikatakan sangat baik dan sangat memudahkan masyarakat akan tetapi memerlukan banyak perbaikan misalnya, jalan kekebun, sawah dan area pertanian agar dapat di aspal dengan begitu memudahkan masyarakat dikarenakan jalan tanjakan apalagi bebatuan membahayakan para petani”

2. Peningkatan Akses Terhadap Layanan Kesehatan Dan Pendidikan

- a) Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dengan adanya puskesmas (pusat kesehatan masyarakat desa) masyarakat Desa Padende sangat terbantu, fungsi puskesmas

desa padende antara lain ;

- a. Puskesmas menyediakan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan umum, pengobatan ringan, imunisasi, konseling kesehatan, dan pencegahan stunting
- b. Puskesmas melakukan kegiatan untuk mencegah penyebaran penyakit menular, seperti program imunisasi, penyuluhan tentang sanitasi dan kebersihan
- c. Puskesmas bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan melalui kegiatan promosi kesehatan, seperti penyuluhan tentang pola makan sehat, olahraga, dan kebiasaan hidup sehat lainnya.
- d. Puskesmas juga melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti penyuluhan tentang pencegahan penyakit tertentu.

b) Pendidikan

Pendidikan di Desa Padende hanya terdapat sekolah dasar yang berada pada dusun 3 dan 2 dengan kondisi seabaga berikut ;

Tabel 1. Jumlah Siswa

Nama Sekolah	Kelas						Jumlah
	I	II	II	IV	V	VI	
SDN Inpres Padende	16	25	17	15	23	18	100
SDN Padende	13	14	13	13	12	13	78

Sumber : Profil Desa Padende, 2023

Tabel 2. Tenaga Kependidikan

Status Pendidikan Terakhir	SDN Inpres Padende	SDN Padende
PNS	9	11
Honorar	2	4
S1	10	7
D2	-	2
SLTA/Sederajat	1	2

Sumber : Profil Desa Padende, 2023

Tabel 3. Fasilitas Sekolah

Jenis	SDN Inpres Padende	SDN Padende	Keadaan Baik/Buruk
	Jumlah		
Kelas	6	6	Baik
Perpustakaan	1	1	Baik
Kantor	1	1	Baik
Ruang Kepsek	1	1	Baik
MCK	5	2	Baik

Sumber : Profil Desa Padende, 2023

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Manda ia mengatakan” peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bahwa pelayanan kesehatan puskesmas sangat baik dikarenakan berbagai macam upaya yang dilakukan seperti pencegahan

stunting usia dini dengan turun langsung memberikan makanan kepada anak – anak usia dini.

Adapun wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Surya mengenai peningkatan pendidikan ia mengatakan” sekolah dasar yang ada di Desa Padende terus berusaha memberikan pendidikan yang baik seperti berupa renovasi berbagai ruangan agar layak untuk ditempati dalam proses belajar dan mengajar”

3. Pemberdayaan Ekonomi

Program – program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Desa Padende adalah dengan berfokus kepada pemberdayaan di bidang pertanian, UMKM dan BUMDES. Adapun program pemerintah yang dilakukan yaitu :

a) **Pemberdayaan Bidang Pertanian**

Pemerintah Desa Padende telah menyiapkan lahan seluas 5 hektar yang akan digarap oleh masyarakat Desa Padende. Para petani telah dibagi menjadi 14 kelompok yang dimana satu kelompok terdiri dari 2 orang dan pemerintah desa telah menyiapkan bibit produktif yang akan dikelola para kelompok tani tersebut. Hasil dari pertanian tersebut akan bagi hasil yaitu 50% dengan pemerintah desa. Lahan tersebut sangat membantu masyarakat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di desa.

b) **Peran Umkm**

Langkah Pemerintah Desa Padende terhadap pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, menengah) dengan menyediakan beberapa lapak yang terdapat di dusun 2 sehingga pelaku umkm mempunyai tempat untuk berjualan

c) **Bumdes**

Desa Padende telah mempunyai Bumdes (Badan usaha milik desa) yang bergerak dalam bidang penyewaan tenda terowongan dan kursi melalui BUMDES tersebut warga dapat kemudahan dalam melakukan acara pernikahan dan sebagainya.

Berdasarkan wawancara terhadap Bapak Ifal yang menyatakan “bahwa program Pemerintah Desa sangat membantu masyarakat dalam keberlangsungan hidup dengan digarapnya lahan desa dapat menambah pendapatan masyarakat dan juga membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat”

4. Perlindungan Sosial

Pemerintah Desa Padende telah mengupayakan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat masyarakat menengah kebawah dengan memberikan bantuan berupa sembako beras perumah tangga 10 liter perbulannya. Adapun bantuan dari Pemerintah Desa Padende yaitu pasar murah bagi seluruh masyarakat Desa Padende dengan kata lain 2 liter minyak, beras 5 kilo, gula 2 liter dan susu 1 kaleng seharga 85 ribu akan tetapi jika ingin membeli dipasar murah harus membeli kupon seharga 85 ribu yang dimana membeli dipasar murah harus menukarkan kupon tersebut, pasar murah ini diadakan ketika hari tertentu seperti menjelang hari raya idul fitri/adha dan natal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ratna ia mengatakan” Dengan adanya bantuan pasar murah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Padende dapat menghemat pengeluaran rumah tangga dalam menjelang hari raya

5. Partisipasi Masyarakat

Pemerintah Desa Padende dengan partisipasi aktif masyarakat, pengambilan keputusan dalam pembangunan desa menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat dapat berkontribusi dengan ide, sumber daya, dan tenaga kerja mereka untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.

Melalui partisipasi masyarakat, potensi lokal dan kearifan lokal dapat lebih diakui dan dimanfaatkan dalam proses pembangunan di desa. Masyarakat Desa Padende dapat mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber daya alam, budaya, dan ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan wawancara terhadap Bapak Sigit ia mengatakan “sangat penting untuk membangun kesadaran dan kepercayaan di antara masyarakat. Kami harus tahu bahwa suara kami didengar dan kontribusi kami dihargai. Keterbukaan dan transparansi dari pemerintah desa dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran juga sangat penting. Selain itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan juga efektif”.

Pemerintah Desa Padende memainkan peran kunci dalam memfasilitasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas upaya tersebut. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga manusia. Keterbatasan ini dapat menghambat implementasi program-program pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi terus menerus terhadap program-program yang telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memberikan dampak yang diinginkan. Evaluasi ini dapat mencakup aspek efisiensi, efektivitas, dan dampak sosial ekonomi dari program-program tersebut. Dengan evaluasi yang baik, Pemerintah Desa dapat memperbaiki program yang sudah ada dan merancang program-program baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Selain itu, penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Desa, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta memperluas akses terhadap berbagai sumber daya dan peluang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menarik kesimpulan Pemerintah desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa melalui berbagai upaya dan program pembangunan. Salah satu strategi utama yang diimplementasikan oleh Pemerintah Desa Padende adalah melalui pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, UMKM dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Desa Padende bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, mengembangkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui berbagai jenis usaha UMKM dan Bumdes. Selain itu, Pemerintah Desa juga melakukan upaya-upaya lain seperti peningkatan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar. Secara keseluruhan, upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa merupakan wujud dari komitmen untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada partisipasi aktif masyarakat. Meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan sumber daya, Pemerintah Desa Padende terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi yang ada dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.

- <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119>
- Herlina, N., & Komariah, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 260. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.821>
- Ley 25.632. (2002). 濟無No Title No Title No Title.
- Luju, E., Wisang, I. V., Wulandari, C. A., & Poin, E. A. (2020). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten *Jurnal Projemen*, 7(1), 37–55.
- “Poverty and Human Development”’. ” (2004).
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Rufaidah, E. (2017). Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa Berbasis Usaha Terbimbing. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(2), 361. <https://doi.org/10.32332/akademika.v22i2.824>
- Sari, I. F., & Sanjani, M. R. (2023). Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1080–1087.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabilla, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1465>
- Solikatun, S., Masruroh, Y., & Zuber, A. (2018). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1). <https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17450>
- Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 514–526.
- Widodo, A., Waridin, W., & Kodoatie, J. M. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.25-42>
- Yuliyantini. (2023). Peran Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dalam Mengatasi Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2669–2675. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5279/http>
- Zainudin, A. (2016). Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(2), 338–351. <https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.338-351>